



KR-Driyanto

Pemeriksaan mata untuk pekerja pengelolaan sampah di hanggar TPST Rempoah Baturraden.

DIGELAR RSKM PURWOKERTO

Pemeriksaan Mata Gratis

BANYUMAS (KR) - Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Purwokerto Jawa Tengah, Kamis (12/12) menggelar bakti sosial (baksos) pemeriksaan mata di hanggar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Rempoah Kecamatan Baturraden, Kamis (12/12). Kegiatan ini sebagai upaya mencegah penyakit katarak dan meningkatkan kesehatan mata masyarakat, khususnya pekerja pengelolaan sampah dan kebersihan.

Direktur RSKM Purwokerto, dr Ahmad Hermanto MM di sela sela kegiatan baksos menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang rentan mengalami gangguan penglihatan, termasuk katarak. "Data menunjukkan, sekitar 1,6 juta penduduk Indonesia mengalami kebutaan dan 81,2 persen di antaranya disebabkan oleh katarak," jelasnya.

Menurut Dokter Aher (panggilan akrab Ahmad Hermanto, petugas kebersihan terutama petugas sampah, memiliki risiko lebih tinggi karena sering terpapar sinar ultraviolet. Dalam bakti sosial, para peserta mendapatkan pemeriksaan kesehatan mata gratis, skrining katarak, serta bantuan berupa obat-obatan. Selain itu juga mendapat kacamata hitam untuk melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet, dan paket sembako.

Dokter Aher menambahkan bahwa katarak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya keturunan, penggunaan obat steroid dalam jangka panjang, diabetes, dan paparan sinar ultraviolet. Untuk itu, pencegahan menjadi langkah penting. "Kacamata hitam yang kami berikan diharapkan bisa melindungi mata mereka dari paparan radiasi ultraviolet, sehingga risiko terkena katarak bisa diminimalkan," tandasnya.

Bagi peserta yang terdeteksi mengalami katarak, RSKM Purwokerto menawarkan operasi katarak gratis. "Kami juga menyediakan program Jempol Oke, yang memfasilitasi antar-jemput pasien untuk menjalani operasi dan kontrol pascapoperasi," tambah Dokter Aher.

Dijelaskan, dari 30 pekerja sampah yang menjalani pemeriksaan satu pekerja mengalami daging tumbuh di mata, delapan normal, serta sisanya mengalami minus dan plus. Untuk yang terkena matanya daging tumbuh akan dirujuk untuk dioperasi dengan biaya gratis. (Dri)-f

UMK Tegal Naik Rp 142.425

SLAWI (KR) - Sudah disepakati kenaikan Upah Minimum (UM) Kabupaten Tegal sebesar Rp 142.425 (6,5 persen), dari semula Rp 2.191.161. Namun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tegal mengaku tidak puas atas kenaikan UMK tersebut, karena tuntutan mereka naik 10 persen tidak dipenuhi. "Sebenarnya dengan kenaikan 6,5 persen itu kami tidak puas, kami awalnya menuntut kenaikan 10 persen dengan pertimbangan harga berbagai kebutuhan hidup naik cukup tinggi. Tapi mau berbuat apa lagi, terpaksa kami menerimanya," kata Ketua SPSI Kabupaten Tegal, Wartono, Kamis (12/12).

Sebelumnya, Rabu (11/12) Pemkab Tegal menetapkan kenaikan UMK setempat 6,5 persen, dari Rp 2.191.161 menjadi Rp 2.333.586. Penetapan kenaikan UMK dibacakan oleh Kepala Bidang (kabid) Hubungan Industri, Jamsosnaker Disperintransnaker Kabupaten Tegal, Agus Masani. "Semua unsur dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja telah menyepakati kenaikan UMK tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Keputusan ini harus dihormati semua pihak dan dilaksanakan. Masalah ada yang tidak puas, itu hal wajar," ungkapnya.

Menurut Wartono, pihaknya sudah maksimal berjuang. Bahkan dalam rapat Dewan Pengupahan pihaknya sempat dialog yang cukup panjang, termasuk berbagai macam argumen dasar usulan kenaikan 10 persen. "Namun karena keputusan dan statemen dari Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 mengunci angka 6,5 persen, maka sudah tidak bisa diutak-atik atau diganggu gugat," tandasnya.

Meski akhirnya menerima, SPSI Kabupaten Tegal memberi catatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal. Di antaranya Pemkab Tegal bisa menerapkan secara benar dan pasti terkait struktur skala upah. Terkait dengan upah minimum sektoral (UMS), Warnoto mengatakan, di Kabupaten Tegal belum pernah membahas UMS. Karena itu pihaknya minta Pemkab Tegal memberikan regulasi cara penghitungan UMS berbentuk Peraturan Daerah (Perda). (Ryd)-f

UMK TEMANGGUNG 2025

Disepakati Rp 2.246.850

TEMANGGUNG (KR) - Dewan Pengupahan Kabupaten Temanggung menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 mengalami kenaikan 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, Ragil Budi Listiantoro mengatakan kesepakatan dewan pengupahan pada sidang pleno di kompleks Setda Pemkab setempat, Kamis (12/12).

Menurutnya, pada sidang tersebut semua perwakilan datang, seperti perwakilan pengusaha dan serikat buruh. UMK Temanggung 2024 sebesar Rp 2.109.690,00 dan kenaikan 5,6 persen dari UMK berjalan sebesar Rp. 137.129,85, sehingga menjadi Rp 2.246.819,85.

"UMK tahun 2025 yang direkomendasikan Bupati Temanggung kepada Gubernur Jawa Tengah dibulatkan ke atas menjadi Rp 2.246.850. Upah Minimum ini nantinya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun," jelas Ragil. Dengan keputusan itu, Pj Bupati Temanggung juga berkeinginan surat kepada Gubernur Jawa Tengah tentang pengusulan perhitungan UMK.

Disebutkan, Serikat Pekerja dan Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK-Apindo) dalam mengusulkan penyesuaian UMK tahun 2025 sesuai dengan formula penghitungan upah minimum pemerintah. Regulasi tersebut sebagaimana diatur Permen Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dengan kenaikan 6,5 persen. (Osy)-f

ENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM RSLH

PT Djarum Gelontorkan Bantuan Rp 5 Miliar

KUDUS (KR) - PT Djarum kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH), perusahaan yang berpusat di Kudus itu bekerja sama dengan Kopi Tubruk Gajah merenovasi dan membangun ulang 100 rumah di Kabupaten Kudus. Total dana yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 5 miliar.

Dana yang disalurkan melalui program RSLH ini terbagi merata untuk renovasi setiap rumah, dengan masing-masing rumah mendapatkan anggaran sekitar Rp 53 juta. Program ini menyasar sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.

Salah satu penerima manfaat dari program RSLH PT Djarum, Noor

Huda penyandang difabel warga Desa Karangmalang Kecamatan Gebog mengatakan bahwa sebelumnya rumah yang ia huni dal kondisi sangat memprihatinkan, bahkan hampir roboh. "Terima PT Djarum yang telah membantu kami. Kini kami sekeluarga bisa tidur dengan tenang dan nyaman tanpa khawatir rumah bocor atau roboh." ungkap Huda, Jumat (13/12), usai acara seremoni serah-terima program RSLH dari PT Djarum kepada penerima manfaat di Pendopo Kabupaten Kudus.

Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie, Forkopimda Kudus, pimpinan dinas terkait, serta perwakilan dari kecamatan dan desa setempat. Muhamad Hasan



KR-Mc Toriq

Pj Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie secara simbolis menyerahkan bantuan RSLH dari PT Djarum kepada penerima manfaat.

Chabibie menyampaikan apresiasinya kepada PT Djarum yang secara konsisten melaksanakan program RSLH sebagai salah satu langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kudus. "PT Djarum telah memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten

Kudus," jelasnya.

Deputy General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto mengungkapkan bahwa program renovasi rumah ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. "Program ini merupakan kelanjutan

INDEKOS DIPROTES WARGA PANDAN LOR

Aktivitas Penyewa Kamar Meresahkan

KARANGANYAR (KR) - Aktivitas penyewa kamar indekos yang meresahkan membuat warga Pandan Lor Rt 03 Rw XIV Desa/Kecamatan Karangpandan mendesak agar kos-kosan tersebut ditutup. Selain tidak pernah mencatatkan identitasnya, ada penyewa diduga open BO alias prostitusi online.

Terdapat tiga unit rumah indekos yang dipersoalkan warga sekitar. Dua unit milik warga setempat dan satu lainnya milik investor dari luar Karanganyar. Awalnya, warga tidak menyoalkan pendiriannya sejak enam tahun silam. Namun makin lama, keberadaannya kian meresahkan.

Ketua RW 14 Pandan Lor, Sugianto mengatakan kekesalan warga setempat berpuncak saat memergoki seorang jejaka asal Yogya hendak bertemu teman kencannya dari aplikasi michat. Setelah didesak, alamat yang dituju di indekos tersebut.

"Pemuda asal Jogja itu ngaku nyari teman kencannya dari Michat. Ter-

nyata yang dia cari penyewa indekos itu. Kami menolak kampung sini jadi tempat prostitusi," kata Sugianto usai rembug warga di Balai RW 14, Rabu (11/12). Rembug warga dihadiri perwakilan Rt 03,04 dan 05 serta kadus Pandan Lor.

Selama enam tahun beroperasi, pemilik indekos tak jarang berseteru dengan lingkungan sekitar. Masalahnya pada pelaporan identitas penyewa kamar yang terkesan ditutupi. Tiga rumah indekos yang terletak di RT 03 itu ditengarai memiliki 44 kamar yang dihuni multigender alias indekos pria dan wanita bercampur. Dua rumah indekos yang milik warga setempat, masing-

masing berisi 18 kamar dan 12 kamar, sedangkan milik investor luar berisi 14 kamar.

Tindakan pengurus RT, RW dan warga Pandan Lor kemudian disalahartikan pemilik dengan tuduhan melakukan sweeping. Pemilik mengadakan aksi tersebut melalui surat yang dikirim ke Camat, Kapolsek, Danramil, Kades dan Ketua RT 03 RW XIV Pandan Lor Karangpandan. Surat juga ditembuskan ke bupati, ketua DPRD dan Kapolres Karanganyar.

"Kami malah dituduh melakukan sweeping. Warga sepakat lebih baik rumah indekos ditutup saja. Adanya malah membuat keresahan," tandas



KR-Abdul Alim

Pemasangan pernyataan penolakan indekos maksiat di Pandan Lor.

Sugianto.

Kuasa Hukum Warga Pandan Lor DR BRM Kusumo Putro SH MH mengatakan warga berhak mendapat ketenangan.

Jika aktivitas penyewa kamar indekos meresahkan, sudah seharusnya pengelola merespons keluhan itu. Serta tidak malah menunjukkan perlawanan. "Surat yang dikirim ke Danramil sampai ke tembusan Bupati Karanganyar itu dibuat oleh seseorang yang mengaku

menantu pemilik. Isinya menuding warga mensweeping. Lagi pula, pembuatan surat itu apakah punya kuasa mewakili pemilik indekos?" tegasnya.

Kusumo menginginkan warga Pandan Lor kembali tentram dan jauh dari aktivitas kemaksiatan. Ia siap melakukan perlawanan secara hukum apabila pemilik rumah indekos masih melakukan persekusi dan fitnah sweeping terhadap warga Pandan Lor. (Lim)-f

BERSINERGI DENGAN PT WILMAR PADI INDONESIA

Blora Dukung Swasembada Pangan

BLORA (KR) - Kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasarakan Komjen Pol Agus Andriyanto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kabupaten Blora, Senin

(9/12) lalu, disambut penuh semangat Bupati Blora Dr Arief Rohman. Diakui, pembangunan Kabupaten Blora beberapa tahun lalu sangat tertinggal dibanding kabupaten lain. Wilayah

tersebut dikenal sebagai penghasil kayu jati dan kaya minyak, namun belum bisa mengangkat derajat kehidupan sosial masyarakatnya.

Hal itu diungkapkan Arief Rohman saat tanam padi bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang dipusatkan di areal persawahan Desa Kentong Kecamatan Cepu. Kegiatan tersebut dilakukan Pemkab Blora dengan menggandeng PT Wilmar Padi Indonesia (bentukan Kementerian Pertanian) yang juga secara serentak dilakukan di 24 titik sentra persawahan Sumatera-Jawa. "Kegiatan tanam padi ini dilakukan serentak, mumpung ini musim

penghujan dan mudah mudahan di tahun mendatang akan ada peningkatan kuantitas maupun luas lahan," kata Saronto selaku Presiden Direktur PT Wilmar Padi Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan, berdasarkan pantauan dari Kementerian Pertanian, luas lahan padi di Jawa maupun luar Jawa sejak dicanangkannya program swasembada pangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Program tersebut bersinergi dengan Kementerian yang lain sebagai program unggulan. "Kita harus mulai bangkit. Kalau dahulu kita bisa swasembada pangan, ke-

napa sekarang tidak? Ini butuh kerja keras semua pihak," kata politikus Partai Gerindra itu.

Arif Rohman menyampaikan, di Kabupaten Blora termasuk lima Kabupaten di Jawa Tengah dengan produksi padi yang cukup diperhitungkan. Lahan padi di Blora mencapai 103.738 hektare dengan produksi padi sejak dicanangkannya program swasembada pangan minimal 627.715 ton. "Dengan penanaman padi bersama di Cepu seluas 200 hektare ini, kami merasa yakin Kabupaten Blora akan ikut menyumbangkan program swasembada pangan, minimal penyanga tingkat Provinsi Jawa Tengah," tegas Arif Rohman. (Ags)-f



KR-Agus Sutomo

Dua menteri dan Bupati Blora tanam padi bersama di Desa Kentong Kecamatan Cepu.

110 KILOMETER JALAN DESA TAK TERAWAT

Pasopati Desak PAW Kades di Pati

PATI (KR) - Persuadaraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Pasopati) Kabupaten Pati mendesak Pemkab setempat melimpahkan perawatan jalan desa ke pemdes lagi. Selain itu, Pasopati mendesak Pemkab Pati segera menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW) jabatan kepala desa.

"Dua hal tersebut, mohon mendapat atensi khusus dari Pemkab Pati. Sehingga tahun 2025 bisa direalisasi," kata Ketua Pasopati, Pandoyo, Kamis (12/12). Disebutkan, awal mula jalan desa sampai diserahterimkan perawatannya ke Pemkab Pati terjadi pa-

melakukan perawatan 110 kilometer jalan desa, diperlukan anggaran sebesar Rp 8,6 triliun. Sedangkan anggaran DPUPR Pati pertahun hanya berkisar Rp 75 miliar.

"Sebaiknya Pemkab Pati mengembalikan kewenangan perawatan jalan desa ke pemdes saja. Nanti untuk biaya perawatan, biar ditangani pemdes. Yakni dengan cara, dari anggaran Dana Desa. Atau dicarikan dari bantuan pokir DPRD kabupaten, propinsi Jateng atau dari DPR RI," tandas Pandoyo.

Ketua Pasopati juga mendesak Pemkab Pati agar segera menggelar

perawatan 110 kilometer jalan desa, diperlukan anggaran sebesar Rp 8,6 triliun. Sedangkan anggaran DPUPR Pati pertahun hanya berkisar Rp 75 miliar.

"Sebaiknya Pemkab Pati mengembalikan kewenangan perawatan jalan desa ke pemdes saja. Nanti untuk biaya perawatan, biar ditangani pemdes. Yakni dengan cara, dari anggaran Dana Desa. Atau dicarikan dari bantuan pokir DPRD kabupaten, propinsi Jateng atau dari DPR RI," tandas Pandoyo.

Ketua Pasopati juga mendesak Pemkab Pati agar segera menggelar



KR-Alwi Alaydrus

Pandoyo

Pergantian Antar Waktu untuk jabatan kades. Karena masalah PAW sebenarnya merupakan hak bagi peserta pilkades yang mendapat dukungan suara di bawah kadakes terpilih. "Beberapa jabatan kades ada yang kosong, disebabkan kades difinitif meninggal dunia. Juga ada

kades yang mundur karena mengikuti pileg dan pilkada," tutur Pandoyo.

Ia menrinci, jabatan kades yang kosong dan sementara ini diisi Pejabat Sementara (Pjs) di antaranya Panjungan (Pati), Sumbermulya (Tlogowongu), Kebonsawahan, Mintomulya dan Gadingrejo (Juwana), serta Desa Jakenan. Kemudian Desa Jimbaran (Margorejo), Sendangrejo dan Pakis (Tayu), Wedusan (Dukuhseti), Triguna dan Kepohkencono (Pucakwangi), Danyangmulya (Winong), Purwokerto (Kayen), dan Cengkakewu kecamatan Sukulilo. (Cuk)-f